

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasca nasionalisasi Jepang atas kepulauan sengketa Senkaku/Diaoyu¹ tahun 2012, Cina beberapa kali menunjukkan sikap yang lebih agresif. Sikap agresif Cina ditunjukkan dengan serangan verbal hingga pengiriman kapal dan pesawat militer di seputaran kepulauan sengketa. Bagi Jepang, aksi yang dilakukan Cina dianggap sangat provokatif. Sikap yang ditunjukkan Cina menjadi suatu pertanyaan bagi konsep pendekatan politik Luar Negeri Cina. Mengingat konsep "*Cina's Peaceful Rise*" yang di utarakan oleh Perdana Menteri Cina Wen Jiabao dalam pidato tesisnya di Universitas Harvard pada Desember 2003.² (Xia, www.nytimes.com 2013).

Mengenai bagaimana status kepulauan, kepulauan Senkaku/Diaoyu yang saat ini berada dibawah kontrol Jepang telah menjadi wilayah sengketa terkait pengakuan kedaulatan teritorial antara Cina dan Jepang sejak satu abad terakhir. Pada september 2012 pemerintah Jepang mengumumkan telah membeli kepulauan senkaku dari keluarga Kirihara³(edition.cnn.com). Sebelumnya, posisi

¹ Kepulauan Senkaku/Diaoyu merupakan deretan delapan pulau dengan lima pulau merupakan pulau tidak berpenghuni dan tiga pulau merupakan karang besar. Jepang dan Cina memiliki nama masing-masing bagi kepulauan tersebut. Jepang menyebutnya „*Senkaku Gunto*” dan „*Diaoyu Tai*” oleh Cina.

² Sebagai referensi mengenai "*Cina's peaceful Rise*" juga dapat dilihat pada Zheng Bijian. 2005a. *Cina's Peaceful Rise: Speeches of Zheng Bijian, 1997-2005*. Washington, D.C.: Brookings Institution Press. ; _____. 2005b. "Cina's 'Peaceful Rise' to Great-Power Status." *Foreign Affairs* 84, no. 5 (September/October): 18-24.

³ Pada tahun 1932 pemerintah Jepang merubah status kepemilikan negara menjadi kepemilikan privat dengan menjual beberapa pulau pada keluarga Koga yang merupakan keluarga pengusaha. Kemudian pada 1978 keluarga Koga menjual beberapa pulau kepada keluarga Kurihara diikuti penjualan satu pulau lagi pada 1988 (Shaw, 1999:31).

Jepang atas kepulauan Senkaku/Diaoyu di jelaskan dalam pernyataan resmi oleh Departemen Luar Negeri Jepang pada tanggal 8 Maret 1972 dengan judul *The Basic View of the Ministry of Foreign Affairs on the Senkaku Island*. Berdasarkan pernyataan tersebut, Jepang mengklaim bahwa kepulauan Senkaku merupakan pulau *terra nullius* (atau tanah tanpa pemilik) pada saat kepulauan itu secara formal dimasukan dalam teritori Jepang pada 1895 (Shaw, 1999:22).

Setelah Perang Dunia II, Jepang menarik klaim atas beberapa teritorial dan kepulauan termasuk Taiwan dibawah Perjanjian Perdamaian San Fransisco tahun 1951. Namun dibawah perjanjian yang sama, pada tahun 1971 kepulauan Nansei Shoto yang berada dibawah perwalian militer AS dikembalikan pada pemerintahan Jepang. Jepang mengatakan bahwa Cina tidak berkeberatan atas kesepakatan San Fransisco dan baru sejak tahun 1970an pemerintah Cina dan Taiwan mulai menekan klaim mereka setelah muncul isu sumber minyak (anonim www.bbc.co.uk). Dasar protes dari pihak Cina mengklaim kepulauan Diaoyu sebagai miliknya adalah dengan bukti Deklarasi Kairo dan Potsdam berisi penantatangan penyerah bersyarat Jepang 1945 (Lee dan Ming, 2012).

Cina kemudian lebih jauh menguatkan klaimnya menggunakan dasar geografi sebagai justifikasi kedaulatan. Dibawah *United Nation Convention on the Law of the Seas* (UNCLOS), sebagaimana didefinisikan dalam Bagian VI, Pasal 76 UNCLOS III, " Landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya ... ke tepi luar dari margin benua , atau untuk jarak 200 mil laut " dari pantai negara (UN, 1982 ; dalam Moura, 2013).

Cina menggunakan aturan ini untuk menguatkan klaimnya, namun secara geografi jarak antara Cina dan Jepang tidak sampai mencapai 400 mil laut sehingga batas-batas mereka menjadi tumpang tindih⁴. Sebelum terjadi pembelian kepulauan oleh pemerintah Jepang, sikap Cina hanyalah sebatas klaim verbal tanpa aksi yang terlalu signifikan. Gesekan-gesekan yang terjadi lebih sering disebabkan oleh gerakan aktivis dan nelayan Cina dan Jepang yang memasuki wilayah kepulauan Senkaku/Diaoyu.

Pada April 2012, Gubernur Tokyo Ishihara menyatakan rencananya untuk membeli kepulauan senkaku dan menimbulkan reaksi protes anti-Jepang di Cina (<http://edition.cnn.com>). Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Liu Weimin menyatakan keinginan Ishihara untuk membeli kepulauan Diaoyu "*irresponsible*". Liu menyatakan "*The Diaoyu Islands are Cina's territory since ancient times,.... The willful talk and action of some Japanese politicians is irresponsible and tarnish and smears Japan's reputation.*" (<http://edition.cnn.com>). Menghadapi kemungkinan kepulauan Senkaku jatuh dibawah yurisdiksi Pemerintahan Metropolitan Tokyo, pemerintah Jepang mengambil langkah ikut masuk dalam penawaran pembelian kepulauan Senkaku. Pada tanggal 11 September, Sekretaris Kabinet Jepang Osamu Fujimura menegaskan bahwa pemerintah telah menyetujui pembelian beberapa pulau dari keluarga Kirihara. Dan dalam sebuah wawancara, Perdana Menteri Jepang Yoshihiko Noda menyatakan tidak ada sengketa

⁴ Kepulauan ini berlokasi di perairan Laut Cina Timur sekitar 120 mil laut Timur-Laut Taiwan, 200 mil laut sebelah Timur pulau utama Cina, 200 mil laut Barat-Daya kota Naha, Okinawa (Shaw, 1999:10).

kedaulatan teritorial dengan Cina dan pertanyaan atas kepemilikan kepulauan Senkaku adalah milik Jepang (<http://edition.cnn.com>).

Pada saat Jepang mengumumkan pembelian kepulauan Senkaku/Diaoyu, kantor berita Cina Xinhua melaporkan bahwa dua kapal pengintai Cina telah tiba di kawasan itu untuk "menegaskan kedaulatan negara". Cina juga melancarkan serangan verbal terhadap Jepang. Kementerian Luar Negeri Cina memperingatkan Tokyo harus "menanggung semua konsekuensi serius". Dikatakan bahwa "pemerintah Cina tidak akan duduk diam menonton kedaulatan teritorialnya dilanggar" (Philips, www.telegraph.co.uk 2012). Sejak itu, kapal pemerintah Cina pada beberapa kesempatan telah berlayar masuk dan keluar dari wilayah sengketa. Kemudian pada Desember 2012 Jepang juga menyatakan bahwa sebuah pesawat pemerintah Cina telah melanggar wilayah udara kepulauan (Anonim, <http://www.bbc.co.uk> 2013).

Nasionalisasi yang dilakukan Jepang juga menimbulkan gelombang gerakan anti-Jepang di kota-kota Cina. Pada 15 september 2012, terjadi protes anti-Jepang terbesar sejak normalisasi hubungan diplomatik Cina-Jepang pada tahun 1972 yang terjadi di sejumlah kota di seluruh Cina. Kedutaan Jepang di Beijing dikepung oleh ribuan pengunjung rasa kemudian pada hari berikutnya gerakan protes terjadi di berbagai kota utama dan berubah menjadi aksi kekerasan ditandai bentrok massa yang menyebabkan beberapa perusahaan besar Jepang seperti Toyota dan Honda menutup sementara pabrik-pabrik dan kantor mereka di Cina. Atas insiden yang terjadi, pemerintah Jepang

menuding pemerintah Cina kurang tanggap dan cenderung membiarkan aksi pengerusakan terjadi (anonim, www.scmp.com 2013).

Setahun setelah pembelian kepulauan Senkaku oleh Jepang situasi hubungan Cina dan Jepang, perkembangan terbaru tidak menunjukkan pertanda baik. Masalah yang semakin rumit dikarenakan rencana Jepang membangun struktur dan personil permanen di kepulauan Senkaku, serta basis patroli militer di daerah tersebut (thediplomat.com). Sementara sebelumnya, juru bicara kementerian Cina Hua Chunying dalam suatu konferensi pers pada April 2013 telah menyatakan bahwa Diaoyu adalah "*core interest*" Cina. "Kepulauan Diaoyu adalah mengenai kedaulatan dan integritas teritorial.... Tentu saja ini adalah *core interest Cina*"(www.bloomberg.com). Hingga saat ini, telah terjadi beberapa insiden antara pihak Jepang dan Cina dikarenakan kapal maupun pesawat Cina yang memasuki wilayah sengketa. Bahkan, Cina sempat melakukan latihan militer di seputaran wilayah sengketa. (Anonim, <http://japandailynews.com> 2013)

Perkembangan yang terjadi baru-baru ini telah mempengaruhi hubungan kerjasama antara Cina dan Jepang yang telah dibina selama bertahun-tahun. Hal ini khususnya juga akan berdampak buruk terhadap hubungan ekonomi kedua negara yang kuat. Investasi Jepang yang pada tahun 2011 mencapai total \$6,3 miliar Dollar akan mungkin menurun pada waktu-waktu kedepan. Dengan Jepang sebagai mitra dagang terbesar ketiga Cina, pengaruh turunnya hubungan bilateral akan mungkin mempengaruhi perekonomian Cina dalam jangka panjang. (Baruah, 2013). Cina dan Jepang memiliki salah satu hubungan perdagangan terbesar

dunia, senilai \$340 miliar Dollar. Bagi Jepang, Cina merupakan mitra dagang dan pasar ekspor terbesar. Terlebih lagi Cina juga menjadi salah satu negara pemegang finansial terbesar terhadap hutang publik Jepang, memegang sekitar ¥18 miliar Yen atau \$230 miliar Dollar, menyusul lonjakan besar 70% sejak 2010 (Chan, www.wsws.org 2012).

Reaksi Cina bisa dilihat dari beberapa aspek yang mendorong. Tren terbaru melihat masalah maritim berkaitan dengan masalah keamanan internasional sebagai area konflik yang disebabkan persaingan yang ketat atas sumber daya alam (Yee 2011: 166). Apa yang berbeda salah satunya adalah pengaruh nasionalisme⁵ di Jepang dan Cina. Dari sikap Cina dan Jepang terkait klaim teritorial ini, keduanya secara tidak langsung menunjukkan rasa persaingan, kekhawatiran strategis dan prospek masa depan. Perasaan dan sikap orang Jepang terhadap Cina mulai berubah sejak seputaran 2010 ketika mereka menyadari bahwa Cina telah melampaui Jepang sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia (Kalha 2012). Status ekonomi dan perkembangan kekuatan militer atau kapabilitas power⁶ juga memberi pengaruh. Contohnya ketika Jepang menangkap sebuah kapal nelayan Cina di dekat kepulauan Senkaku/Diaoyu, namun terpaksa mundur dan melepaskan mereka ketika Cina mengancam untuk memotong ekspor bahan mineral penting dalam pembuatan barang hi-tech (Kalha 2012). Dari sisi

⁵ Nasionalisme dapat berupa suatu ideologi atau suatu bentuk dari perilaku atau bisa merupakan keduanya. Sebagai ideologi, nasionalisme merepresentasikan sebuah sistem dari ide-ide yang biasanya berhubungan dengan hak *self-determination*. Sebagai perilaku, nasionalisme dapat berupa respon rasional terhadap suatu keadaan, dan berkembang menjadi reaksi nasionalis atau gerakan. Lebih jauh lihat Anthony D. Smith. (1991). *National Identity*. pp 72. ; Easman, Milton j. (1994). *Ethnic Politics*, pp 28. ; Kellas, James G. (1998). *The Politics of Nationalism and Ethnicity*. Pp 31.

⁶ Charles W. Freeman, Jr. Menggambarkan kapabilitas power berbicara mengenai sumber daya dan kapabilitas yang mana aspek-apeknya nyata dan dapat terukur (biasanya digunakan oleh geopolitician dan militer).

militer, dapat dilihat dari pertimbangann yang seperti *Defence White Paper* sebutkan, modernisasi militer Cina akan semakin ditandai dengan pengembangan kemampuan proyeksi kekuatan yang signifikan (Department of Defence, Australian Government,).

I.2 Rumusan Masalah

Dengan melihat kasus nasionalisasi Jepang atas kepulauan sengketea Senkaku/Diaoyu yang telah meningkatkan ketegangan Cina-Jepang, apa arti penting kepulauan Diaoyu bagi Cina dan bagaimana nasionalisme serta kapabilitas power yang dimiliki Cina saat ini mempengaruhi sikap Cina hingga cenderung kearah yang lebih agresif ?.

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan arti penting Kepulauan Diaoyu bagi Cina dan menganalisa pengaruh nasionalisme serta kapabilitas power Cina terhadap sikap cina yang cenderung agresif menyikapi nasionalisasi kepulauan Senkaku/Diaoyu yang dilakukan oleh Jepang pada tahun 2012. Akan dilihat bagaimana dinamika nasionalisme dan kapabilitas power Cina. Kemudian, lebih mendalam, penulis berusaha menjelaskan bagaimana dinamika nasionalisme dan kapabilitas power yang dimiliki Cina tersebut mempengaruhi sikap yang di tunjukan Cina.

I.4 Kerangka Pemikiran

I.4.1 Fokus Pemikiran

Fokus penelitian ini terdiri dari unit analisa dan unit eksplanasi. Unit analisa adalah unit yang perilakunya akan dijelaskan dalam penelitian. Sedangkan unit eksplanasi adalah unit yang mempengaruhi unit analisa. Dalam penelitian ini, yang menjadi unit analisa adalah perubahan sikap Cina kearah yang lebih agresif dihubungkan dengan nasionalisasi Jepang atas kepulauan sengketa, sedangkan yang menjadi unit eksplanasinya adalah nasionalisme dan kapabilitas power Cina. (Buzan dkk, 1995. dalam Perwita & Yani 2005).

I.4.2 Landasan Teoritik

I.4.2.1 Nasionalisme dan Agresifitas

Terkait Nasionalisme, Mill dalam tulisannya *Representative Government* memberikan gambaran dalam memandang nasionalisme terutama dalam konsep "*rational nationalism*" harus dipahami sebagai dialektika yang alami. (Mill 1861) Berbeda dengan realis dan liberalis yang didasarkan pada keadaan rasional kepentingan sendiri, konstruktivis menemukan bahwa faktor ideasional, sering digambarkan sebagai non-materi dan mendikte aksi negara (Wendt 1995). Norma dan identitas adalah apa yang dipresepsikan negara melalui penciptaan subjektif dari politik identitas. Oleh karena itu, identitas menjadi lebih dominan dibandingkan rasionalitas oleh aktor dalam mendefinisikan serta perilaku konsekuen untuk melindungi kepentingannya (Wendt, 1999: 238-243). Norma dan identitas adalah apa yang di presepsikan negara melalui penciptaan subjektif dari politik identitas. Dengan begitu gerakan nasionalis yang berlangsung di Cina

didasari karena nasionalis Cina percaya bahwa mereka perlu melindungi kepentingan nasional mereka, dan juga karena mereka merasa kepentingan mereka telah terancam atau dilanggar. Mereka terinspirasi oleh identitas nasional mereka untuk bertindak seperti "patriot".

Berbagai diskusi teoritis perilaku negara dapat diterapkan untuk hubungan luar negeri Cina, namun perdebatan utama adalah apakah Cina dimotivasi oleh logika politik-riil atau oleh kendala sosial seperti nasionalisme dalam masyarakat maupun politik. Christensen berpendapat Cina adalah "*the high church of realpolitik*.", dengan begitu Cina berfokus pada cara struktur internasional mengubah hubungan dengan tujuan memaksimalkan kekuatan dan kepentingan relatif (Christensen 1996. Pg, 37). Namun, Johnston menemukan bahwa perilaku internasional Cina mendapat pengaruh dari sisi sosial. Dengan demikian, Cina tidak mungkin untuk mengabaikan realitas material dari kebangkitan Cina dan faktor dalam hubungan luar negerinya, menjadi penting untuk mengakui faktor ideasional atau konstruksi sosial yang berdampak terhadap urusan internasional (Johnston 2007). Bahkan, nasionalisme telah muncul sebagai kekuatan utama dalam politik. Contohnya adalah saat Xi Jinping mengkritik AS terkait ekonomi internasional dan kebijakan bantuan AS, sehingga mengangkat pendekatan Cina (Anonim, <http://news.asiaone.com> 2009).

I.4.2.2 Teori *Power Transition*

Realis yang melihat negara sebagai aktor utama dan fokus pada pergeseran relasi kekuasaan dalam sistem internasional antara negara-negara. Robert Gilpin

menunjukkan bahwa ketika kekuatan negara meningkat, *„a state will seek to change the international system through territorial, political and economic expansion until the marginal costs of further change are equal to or greater than the marginal benefits“* (Gilpin 1981: 106). Berdasarkan premis Gilpin, realis mengklaim bahwa Cina tidak puas dengan struktur internasional yang ada dan hubungan kekuasaan yang dihasilkannya, dan dengan demikian berusaha untuk menantang status quo (Buzan & Segal 1994, Pg: 6, Gernstein & Munro 1997).

Untuk beberapa realis lain, seperti Friedberg (1993), dan Organski Kugler (1980), *great power* yang tidak puas akan cenderung untuk menantang negara dominan dan mungkin bisa menyebabkan konflik dan perang. Cina, sesuai dengan kriteria dan termasuk dalam kategori *great power* ini. Prinsip prediksi akan *power* dari teori ini adalah dalam kemungkinan perang dan stabilitas aliansi. Gelombang pengaruh yang besar terjadi ketika pesaing kekuatan dominan masuk dan tidak puas dengan sistem yang ada. Demikian pula, aliansi yang paling stabil ketika pihak aliansi puas dengan struktur suatu sistem. Ada hal lain lebih lanjut untuk teori ini : misalnya, faktor penyebab *Power Transition* bervariasi dalam pola perubahan mereka, perubahan populasi menjadi pola dengan pengaruh terendah dan kapasitas politik (didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah untuk mengontrol sumber daya internal untuk negara) sebagai pola perubahan dengan pengaruh terbesar (Ronald L. Tamen *et al*, 2000).

Lebih jauh, Kugler dan Tamen (2004) dalam tulisannya *“Regional Challenge: Cina’s Rise to Power”* menunjukkan dari segi populasi dan pertumbuhan ekonomi, Cina memiliki potensi menjadi dominan bahkan untuk

tahun-tahun kedepan⁷. Merujuk pada tulisan Kugler dan Tamen, untuk melihat bagaimana interaksi antara Cina dan Jepang serta bagaimana negara mengambil sikap berdasarkan kapabilitas power yang dimiliki maka dapat dilihat berdasarkan faktor status quo, konflik dan kooperasi, hirarki. (Kugler, Tamen 2004).

Berkaitan dengan perilaku negara, negara tidak pernah bisa yakin tentang tujuan masing-masing. Mereka tidak bisa tahu dengan tingkat kepastian yang tinggi apakah mereka berhadapan dengan negara revisionis atau status quo. Bahkan jika ada yang bisa memastikan tujuan suatu negara saat ini, tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi di masa mendatang. Hal itu karena mustahil mengidentifikasi siapa yang menjalankan kebijakan luar negeri suatu negara 5 atau 10 tahun kedepan dan apakah mereka akan bersikap agresif (Copeland, 2000; Leviathan, 1985; Mearsheimer, 2001). Negara yang hampir tidak memiliki kemampuan ofensif tidak bisa menjadi negara revisionis, karena tidak memiliki sarana untuk bertindak agresif. Satu masalah dengan pendekatan ini adalah bahwa sulit untuk membedakan antara kemampuan militer ofensif dan defensif. Masalah mendasar adalah bahwa kemampuan yang dikembangkan negara untuk membela diri sering memiliki potensi ofensif yang signifikan (Mearsheimer, 2010).

I.5 Hipotesis

Bagi Cina, kepulauan Diaoyu merupakan aset yang penting dikarenakan kekayaan alam maupun posisi kepulauan terhadap eksplorasi ZEE yang mana berkaitan dengan ekonomi Cina kedepannya. Namun sikap Cina tidak hanya dipengaruhi keinginan menguasai sumber daya alam dan wilayah semata, namun

⁷ Lihat Kugler, J. Ronald Tamen. (2004) *Regional Challenge: Cina's Rise to Power*, in: *The Asia-Pacific: A Region in Transition*, ed. J. Rolfe, Asia-Pacific Centre for Security Studies, Honolulu. Pp. 38-43

juga karena pengaruh nasionalisme yang berkembang di Cina dan Peningkatan kapabilitas power. Kebijakan pemerintah Cina sudah sangat mendapat perhatian dan tekanan dari pihak nasionalis baik itu melalui internet maupun aksi protes terhadap sikap Cina dalam beberapa kasus. Lebih jauh, elit politik Cina juga masih tidak lepas dari jinggoisme dan ini sejalan dengan bagaimana Cina akan merespon tekanan nasionalis. Sementara kapabilitas power membuat Cina semakin lebih memiliki posisi wilayah regional Asia maupun Dunia dan itu mampu meningkatkan kepercayaan diri Cina.

I.6 Metodologi Penelitian

I.6.1 Definisi Konseptual dan Operasional

I.6.1.1 Nasionalisme dan Bentuk Nasionalisme Cina

Meskipun istilah "nasionalisme" memiliki berbagai makna, nasionalisme secara umum digunakan untuk menggambarkan dua fenomena : (1) sikap anggota suatu bangsa saat mereka peduli tentang identitas mereka sebagai anggota bangsa itu dan (2) tindakan yang diambil para anggota suatu bangsa dalam berusaha untuk mencapai (atau mempertahankan) beberapa bentuk kedaulatan politik (Nielsen 1998-9, 9). Masing-masing aspek memerlukan elaborasi. (1) menimbulkan pertanyaan tentang konsep bangsa atau identitas nasional, tentang apa itu milik bangsa, dan tentang seberapa seseorang harus peduli pada suatu bangsa, sementara dalam hal keanggotaan seorang individu dapat secara sukarela atau tidak. (Smith, 1991). (2) menimbulkan pertanyaan tentang apakah kedaulatan memerlukan akuisisi kenegaraan penuh dengan otoritas penuh untuk urusan

domestik dan internasional, atau apakah sesuatu yang kurang dari kenegaraan akan cukup. Meskipun kedaulatan sering diartikan kenegaraan penuh (Gellner 1983, ch. 1).

Secara umum terdapat kesepakatan tentang apa yang secara historis paling khas terkait paradigmatik nasionalisme. Kedaulatan teritorial secara tradisional dilihat sebagai elemen penentu kekuasaan negara, dan penting untuk kebangsaan. Teritorial negara sebagai unit politik dipandang oleh kaum nasionalis sebagai 'milik' utama satu kelompok etnis-budaya, dan secara aktif bertugas melindungi dan menyebarkan tradisi-tradisinya (Miscovic, 2010).

Variasi nasionalisme Cina yang paling relevan telah muncul sebagai kekuatan yang kuat di Cina setelah 1979, Cina mencakup empat generasi yang berbeda: pertama yaitu generasi revolusioner di 1930s/40s, generasi kedua selama masa komunis dengan fokus pada membersihkan sayap kanan selama tahun 1950, generasi ketiga pada tahun 1970 dengan revolusi budaya, dan yang paling baru saat ini pasca generasi 1970an. Generasi keempat unik karena muncul pada masa “*relative material prosperity*” yang juga memiliki “*a strong desire to make their mark*”(Gries 2005, pg 4-5). Gries menyatakan, telah terjadi kenaikan di Cina berhubungan dengan nasionalisme terkait kebutuhan untuk tampil atau ditampilkan sebelum orang lain (Gries 2005, pg 20).

I.6.1.2 Kapabilitas Power

Para akademisi seringkali mendefinisikan *power* sebagai sebuah cara, artinya kekuatan dan kapasitas yang membentuk kemampuan untuk mempengaruhi perilaku aktor lain agar bertindak sesuai dengan tujuan aktor yang

mempengaruhi tersebut (Griifiths&O'Callaghan, 2002: 253). Menurut Morgenthau, *power* merupakan sebuah hubungan antara dua aktor politik dimana aktor A memiliki kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap perilaku dan pikiran aktor B.

Dalam teori *Power Transition* menggambarkan politik internasional sebagai hirarki dengan (1) negara "*dominant*", suatu negara dengan proporsi terbesar dilihat dari sumber daya *power* (populasi, produktivitas, kapasitas politik dalam artian koherensi dan stabilitas, dll), (2) "*great powers*", negara-negara potensial dalam menyaingi negara dominan dan yang juga berperan dalam tugas-tugas pemeliharaan sistem dan kontrol alokasi sumber daya *power*, (3) "*middle powers*", dalam ruang lingkup regional yang memiliki potensi mirip dengan negara dominan namun tidak dapat menantang negara dominan atau struktur sebuah sistem. Dan (4) "*Small powers*" negara-negara sisa lainnya.

Komponen suatu *power* bangsa dalam menghasilkan kemampuan untuk mempengaruhi perilaku bangsa lain dapat dilihat dari sisi populasi, produktivitas dan kapasitas politik⁸. Kapabilitas merupakan agregasi dari populasi dunia, penduduk perkotaan, pengeluaran militer, personil militer, produksi besi dan baja, dan batu bara dan konsumsi minyak. Teori Transisi Power menggunakan output total ekonomi suatu bangsa ditimbang dengan kapasitas politiknya. Parameter COW dan GDP sangat berkorelasi⁹ (Kugler, Arbetman 1989). Ketiga elemen

⁸ Merujuk *Composite Capabilities Index of the Correlates of War (COW)*, lihat J. David Singer, and Melvin Small, (1966) „*The Composition and Status Ordering of the International System: 1815-1940*“, *World Politics*, 18, pp.236-82.

⁹ Perbandingan dari dua ukuran tersebut dapat ditemukan di Jacek Kugler, and Marina Arbetman, „*Choosing among Measures of Power: A Review of the Empirical Record*“, Michael Ward and Richard Stoll eds., *Power in World Politics* (Boulder: Westview Press, 1989)

berubah seiring waktu pada tingkat yang berbeda. Ukuran populasi sulit untuk memodifikasi dalam jangka pendek, sementara produktivitas ekonomi bisa diubah lebih cepat. Sementara itu kapasitas politik yang stabil dan perubahannya tidak dapat diprediksi secara akurat. Untuk alasan ini Kugler dan Tamen lebih berkonsentrasi pada jumlah populasi dan tingkat produktivitas ekonomi Cina (Kugler, Tamen 2004)

I.6.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksplanatif yang bermaksud untuk menjelaskan variabel-variabel yang diteliti beserta dengan hubungan antar variabel (Suyanto dan Sutinah, 2004). Dalam hal ini, peneliti berusaha menjelaskan hubungan kausal antar variabel melalui pengujian hipotesis. Penelitian ini berusaha menjelaskan pengaruh perubahan kapabilitas power Cina serta nasionalisme yang seperti apa dan bagai mana itu mempengaruhi perubahan sikap yang lebih keras terhadap Jepang pasca pembelian kepulauan sengketa antara Cina-Jepang pada tahun 2012.

I.6.3 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini berusaha menjelaskan pengaruh nasionalisme dan kapabilitas *power* Cina pada perubahan sikap Cina terhadap Jepang hingga cenderung kearah yang lebih agresif, dengan fokus reaksi Cina pasca pembelian kepulauan Senkaku/Diaoyu oleh Jepang tahun 2012 dengan melihat faktor yang mendorongnya. Rentang waktu yang digunakan dalam penelitian ini lebih pada

melihat momentum pembelian kepulauan sengketa oleh Jepang pada September 2012. Pada momentum 2012, sikap Cina yang cenderung lebih agresif disinyalir akibat respon terhadap naiknya nasionalisme di Cina serta tekanan pihak nasionalis. Sikap Cina yang cenderung lebih agresif juga disinyalir akibat semakin menguatnya *power* Cina di Asia Timur terutama kekuatan ekonomi terhadap Jepang.

I.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan kajian dokumen. Dokumen diartikan sebagai suatu catatan tertulis / gambar yang tersimpan tentang sesuatu yang sudah terjadi. Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi (Moleong, 2005). Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data tersimpan di website, dan lain-lain. Dokumen tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi untuk penguat data dalam membuat interpretasi dan penarikan kesimpulan.

I.6.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit,

melakukan sintesa dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Bogdan dan Bilken 1982). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu analisis mendalam berdasarkan interpretasi dan teori terhadap data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicari data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul (Silalahi, 2006). Analisis dilakukan dengan melihat data dan fakta, kemudian data dan fakta dikorelasikan dengan landasan teori dan konsep.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini akan disusun sebagai berikut:

1. BAB I. Merupakan metodologi penulisan penelitian yang tersusun atas latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran yang terdiri dari peringkat analisis dan landasan teoritik, hipotesis, metodologi penelitian yang terdiri dari definisi konseptual dan definisi operasional, tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta sistematika penulisan.
2. BAB II. Berisi tentang arti penting dari kepulauan Diaoyu bagi Cina, arti penting ini adalah mengenai nilai Kepulauan sebagai Objek

3. BAB III. Berisi penjelasan bentuk nasionalisme Cina dan pengaruhnya terhadap perubahan sikap yang lebih agresif pada Jepang pasca pembelian kepulauan sengketa oleh Jepang
4. BAB IV. Berisi penjelasan menguatnya *power* Cina di Asia Timur terutama kekuatan ekonomi terhadap Jepang dan pengaruhnya terhadap perubahan sikap yang lebih agresif pada Jepang pasca pembelian kepulauan sengketa oleh Jepang.
5. BAB V. Berisi analisis terhadap pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya
6. BAB VI. Berisi kesimpulan, implikasi penelitian serta saran berdasarkan analisis yang telah disampaikan. Pada bab terakhir ini, penulis akan memberikan kesimpulan apakah hipotesis yang diajukan pada bab pertama terbukti benar atau tidak.